

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
54/PUUXVI/2018 TENTANG AMBANG BATAS  
PENCALONAN PRESIDEN (*PRESIDENTIAL  
THRESHOLD*)**

**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**M. ZIKRI NEVA NUGRAHA  
B10018191**

**Pembimbing:**

**Irwandi, S.H., M.H**

**Dr. Arfa'I, S.H., M.H**

**JAMBI**

**2023**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, Juli 2023

**M. Zikri Neva Nugraha**  
B10018191

## ABSTRAK

Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan polemik setiap menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, terutama Pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential treshold*). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan menguji konstiusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah memutuskan ambang batas pencalonan preisiden dan wakil presiden adalah sesuai konstitusi. Oleh karenanya penting untuk ditelisik, apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 54/PUUXVI/2018 serta Bagaimana *Ius Constituendum* Penghapusan *Presidential Threshold* Di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dikarenakan adanya Konflik Norma antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu ini menurut penulis bertetangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Pertimbangan Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal ambang batas (*presidential treshold*) adalah konstiusional. Dengan pertimbangan, ambang batas bukanlah Pasal diskriminatif, karena tidak berpotensi menghilangkan pasangan capres dan cawapres alternatif. Ambang batas pencalonan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) terbuka yang didelegasikan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, penerapan ambang batas pencalonan digunakan sebagai upaya penguatan sistem presidensial dan penyederhanaan jumlah partai politik. Serta, penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya tidak menghilangkan esensi pelaksanaan Pemilu. Bahwa Putusan Nomor 54/PUUXVI/2018 adalah inkonstitusional. Selanjutnya berlakukannya *presidential threshold* kurang tepat untuk penguatan sistem presidensial di Indonesia, sehingga menurut penulis langkah yang paling tepat adalah menghapus mengenai ketentuan ini.

**Kata Kunci :** *Ambang Batas, Pemilihan Presiden, Pertimbangan Hakim.*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan oleh :**

**Nama** : M. Zikri Neva Nugraha  
**NIM** : B10018191  
**Program Kekhususan** : Hukum Tata Negara  
**Judul Skripsi** : Analisis Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018  
Tentang Ambang Batas Pencalonan  
Presiden (*Presidential Threshold*)

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini  
untuk di pertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jambi.**

**Pembimbing I**

**Jambi, Juli 2023**

**Pembimbing II**

**Irwandi, S.H., M.H.**  
NIP. 195912101990011001

**Dr. Arfa'I, S.H., M.H.**  
NIP. 198110162006041003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JAMBI  
FAKULTAS HUKUM**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : **M. Zikri Neva Nugraha**  
Nomor Mahasiswa : **B10018191**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Proposal Skripsi : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
54/PUUXVI/2018 Tentang Ambang Batas  
Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)**

**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim penguji Fakultas  
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 4 April 2023  
dan dinyatakan LULUS**

**TIM PENGUJI**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>Dr. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M.</b>	<b>Ketua</b>	_____
<b>Muhammad Amin, S.H., M.H.</b>	<b>Sekretaris</b>	_____
<b>Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum.</b>	<b>Penguji Utama</b>	_____
<b>Irwandi, S.H., M.H.</b>	<b>Anggota</b>	_____
<b>Dr. Arfa'I, S.H., M.H.</b>	<b>Anggota</b>	_____

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jambi,**

**Dr. Usman, S.H., M.H.  
NIP. 1964050319900031004**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas seijin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi, Skripsi ini berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUUXVI/2018 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)**”

Penyelesaian penelitian dan penulisan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, pengarahan dan dukungan dari pembimbing tugas akhir, penulis juga banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dukungan penuh yang telah dicurahkan kepada orang tua penulis, yang selalu mendorong penulis agar bisa segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk :

1. Dr. Usman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis selama penulis proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Akademik Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi,

yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi kependidikan.

3. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H.. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memenuhi sarana dan prasarana serta perlengkapan perkuliahan sehingga penulis dapat mengenyam Pendidikan dengan layak.
4. Dr. Zarkasi, S.H., M.H. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang Kemahasiswaan.
5. Merry Yarni, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Irwandi, S.H., M.H., dan Dr. Arfa'I, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua Penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah senantiasa mengajar dan mendidik penulis selama dibangku perkuliahan, baik dalam suka maupun duka, semoga jasa bapak dan ibu dosen menjadi amal jariyah disisi ALLAH SWT.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
9. Seluruh Rekan-rekan seperjuangan FH 2018 yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan ilmu selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak bias di sebutkan satu persatu, namun sebagai manusia biasa masih terdapat kekurangan, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Jambi, Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TEORI KEDAULATAN RAKYAT, TEORI DEMOKRASI, TEORI KEPASTIAN HUKUM, DAN TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMILU</b>	
A. Teori Kedaulatan Rakyat .....	19
B. Teori Demokrasi.....	22
C. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	27
D. Tinjauan Umum Pemilihan Umum.....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN     PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 54/PUUXVI/2018 DAN IUS CONSTITUENDUM PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD</b>	
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konsitusi Dalam Putusan Nomor 54/PUUXVI/2018 .....	33
B. <i>Ius Constituendum</i> Penghapusan <i>Presidential Threshold</i> di Indonesia.....	46
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	59
B. SARAN .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	